

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIMEDIASI INDEKS DEMOKRASI TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH

Zainuddin¹, T. Makmur²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

²Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: zainuddin@serambimekkah.ac.id

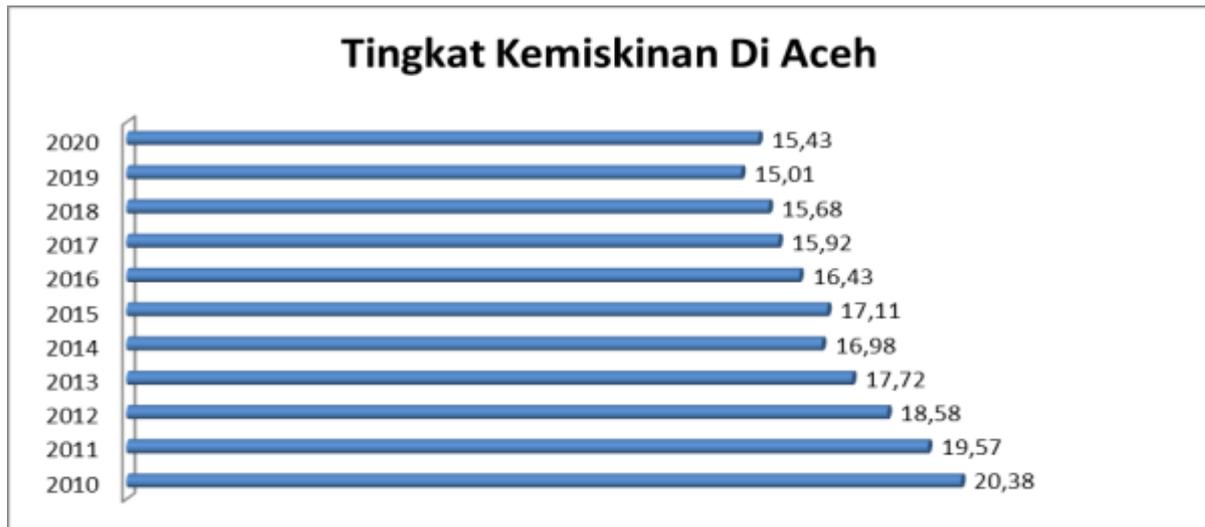
Abstrak: Analisis ini bertujuan mengkaji pengaruh langsung variabel pertumbuhan ekonomi yang diprosikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto dan variabel indeks demokrasi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh, dan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi yang mediasi oleh variabel indeks demokrasi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini termasuk katagori data sekunder yang bersumber dari www.bps.go.id provinsi Aceh dan pengamatan selama rentang waktu 2010-2020. Analisis data pengaruh langsung variabel independen dan variabel mediasi terhadap variabel dependen dilakukan dengan Method Least Squares dan untuk mengetahui kemampuan mediasi dilakukan analisis menggunakan Sobel Test Method. Hasil analisisnya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan variabel indeks demokrasi berpengaruh, serta indeks demokrasi tidak bisa memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama periode 2010-2020. Oleh sebab itu, apabila mau mengentaskan kemiskinan di provinsi Aceh, maka pemangku kepentingan harus mendorong terciptanya demokrasi berjalan dengan baik dan berusaha agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks demokrasi

1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan suatu daerah yang paling utama adalah untuk terciptanya kemakmuran rakyat atau bisa terangkat rakyat dari kemiskinan (Rassanjani 2018). Oleh sebab itu, kemiskinan itu harus dipandang sebagai suatu fenomena-fenomena yang perlu konsentrasi oleh pemangku kepentingan dalam hal pemecahannya. Karena kemiskinan itu sangat berdampak pada kualitas kehidupan rakyat dan dapat menghambat dalam penciptaan sumber daya yang berdaya saing tinggi untuk mengisi pembangunan yang berkelanjutan. Provinsi aceh yang masih tercatat sebagai yang termiskin di pulau Sumatera (www.bps.go.id). Walaupun konjunktur bumi Aceh termasuk subur dan beriklim tropis sangat mendukung kebanyakan profesi rakyat Aceh sebagai petani dan nelayan. Akan tetapi kemiskinan tak pernah bisa diselesaikan hingga berganti pucuk kepemimpinan hingga tahun 2023 di provinsi paling barat Indonesia, maka terlihat begitu kompleks permasalahan kemiskinan yang terjadi di provinsi Aceh.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan yang terjadi di provinsi Aceh diantaranya diterpa musibah tsunami yang dahsyat pada tanggal 24 Desember 2004 dan lamanya daerah Aceh dilanda komplik bersenjata hingga mencapai kesepakatan damai antara Aceh dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 serta banyak lagi hambatan lainnya dalam pengentasan kesmiskinan. Gambaran tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Aceh hingga tahun 2020, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Aceh 2010-2020

Sumber: www.bps.go.id (dioalah)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Aceh masih tergolong tinggi dan bahkan hingga tahun 2020 kemiskinan masih berada pada posisi 15.43% dari jumlah penduduk. Tingginya tingkat kemiskinan yang ada perlu dilakukan upaya-upaya secara sungguh-sungguh, baik tingkat teknis maupun tindakan perencanaannya. Namun, banyak faktor yang bisa dilakukan untuk pengentasan kemiskinan diantaranya pertumbuhan ekonomi yang dimediasi oleh demokrasi (Akib et al. 2016), (Wandita, Gunarto, and Ratih 2022) dan (Lestari and Rahmawati 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan produksi barang dan jasa yang terjadi dalam satu periode tertentu. Bila pertumbuhan ekonomi konsisten terjadi setiap periode, maka dengan sendirinya akan berdampak pada terciptanya kemakmuran atau dapat menurunkan tingkat kemiskinan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi harus bisa terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan cara memperhatikan kualitas pertumbuhan itu sendiri dan ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Lestari and Rahmawati 2021). Pertumbuhan ekonomi akan dapat menurunkan kemiskinan bila terciptanya kesempatan kerja (Purnomo and Istiqomah 2019). Dalam rangka untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh harus ada aliran investasi yang masuk, baik dari internal maupun dari eksternal dan investasi masuk kesuatu daerah regional sangat ditentukan oleh indeks demokrasi, seperti yang dinyatakan oleh (Zouhaier and Karim 2012) bahwa adanya hubungan signifikan antara demokrasi dengan investasi dan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, demokrasi yang diukur dengan indeks demokrasi bisa memediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat kiranya mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Demokrasi yang baik dan benar akan sangat disukai oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Aceh, sehingga pada akhirnya akan dapat tercipta kesemarakn kegiatan ekonomi itu sendiri. demokrasi yang baik akan memberikan kebaikan kepada masyarakat dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan (Enzovani 2020). Dengan demikian, muncul pertanyaan analisis ini, yaitu apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi yang dimediasi indeks demokrasi terhadap kemiskinan di Aceh.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan bukan hanya masalah individu, tetapi lebih menyangkut masalah struktural, di mana kemiskinan terjadi karena ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia (Padu 2015). Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dalam

memenuhi kebutuhannya dan ada empat bentuk kemiskinan, yaitu 1) Kemiskinan absolute, yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja, 2) Kemiskinan relative, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan, 3) Kemiskinan cultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar, dan 4) Kemiskinan structural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (Suryawati 2005). Menurut BPS (2008) dalam (Prmono and Marsisno 2018) ada dua jenis kemiskinan, 1) kemiskinan relative, yaitu kurang mampu akibat kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan absolute, yaitu ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum tersebut seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Indikator kemiskinan didasarkan pada kebutuhan dasar, yaitu persentase penduduk kurang mampu dibawah garis kemiskinan (*Head Count Index*) dengan formula $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q [\frac{z - y_i}{z}]$, dimana z adalah garis kemiskinan, n adalah jumlah penduduk, y adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari penduduk di bawah garis kemiskinan, q adalah angkanya penduduk di bawah garis kemiskinan, dan n adalah populasi.

Pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan sebagai acuan adalah *Exogenous Growth Model* atau *Solow Growth model*. Model pertumbuhan Solow memakai formula fungsi produksi agregat, yaitu $Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$, dimana Y adalah Produk Domestik Bruto, A adalah kemajuan teknologi, K adalah *stock* modal fisik, L adalah tenaga kerja, dan α adalah elastisitas output terhadap modal (Maryaningsih 2014). Dalam analisis ini pertumbuhan ekonomi diprosikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (www.bps.go.id). Dalam analisis ini PDRB diukur atas dasar harga konstan, yaitu menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, demokrasi dalam penelitian ini diprosikan sebagai indeks demokrasi. indeks demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil/*civil liberty*, hak-hak politik/*political rights*, dan lembaga-lembaga demokrasi/*institution of democracy* (www.bps.go.id). Ada hubungan antara demokrasi dengan investasi dan kebebasan sipil dengan pertumbuhan (Zouhaier and Karim 2012) dan (Riza 2013). Menurut (www.bps.go.id) indeks demokrasi dapat diberikan skor dengan nilai, yaitu 1) jika < 60 adalah kinerja demokrasi termasuk buruk, 2) jika 60 – 80 adalah kinerja demokrasi termasuk sedang, dan 3) jika 80 > adalah kinerja demokrasi termasuk baik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh dengan pengamatan selama periode 2010-2020 dan mempergunakan data sekunder yang bersumber dari www.bps.go.id provinsi Aceh berupa data kemiskinan, indeks demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis data yang dilakukan dengan *Method Least Squares*, dan regresi linier adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: $Y_i = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon$
- b. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dimediasi indeks demokrasi terhadap variabel dependen, yaitu: $Y_i = X_1\beta_1 + X_1\beta_1 X_2\beta_2 + \varepsilon$

Untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut mempergunakan *Sobel test*. Adapun rumus dari *sobel test* $Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SEa^2 + a^2 SEb^2)}}$ dimana, a adalah koefisien variabel bebas, b adalah koefisien variabel mediasi, SEa adalah *standard error of estimation* dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, dan SEb adalah *standard error of estimation* dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen (Nur 2018). Adapun pengujian pengaruh langsung variabel independen dan variabel mediasi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

H_0 : jika $\beta_{(1\&2)} = 0$ dan nilai Prob > nilai kritis (0.05), maka variabel independen dan variabel mediasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

H_a : jika $\beta_{(1\&2)} \neq 0$ dan nilai Prob < nilai kritis (0.05), maka variabel independen dan variabel mediasi secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Pengujian mediasi dapat dilakukan sebagai berikut:

H_0 : jika nilai $Z_{hitung} < 1,98$, maka hubungan tersebut tidak signifikan dan tidak dapat memediasi

H_a : Jika nilai $Z_{hitung} > 1,98$, maka membuktikan bahwa hubungan tersebut signifikan dan dapat memediasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskripsi statistik data penelitian kemiskinan (KM), pertumbuhan ekonomi (PE) dan indeks demokrasi (ID), seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Diskripsi Statistik

	KM	PE	ID
Maximum	20.38	4.95	79.97
Minimum	15.01	-0.74	54.02
Std. Dev.	1.744061	1.918923	8.365447
Observations	11	11	11

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan (KM) maksimum di provinsi Aceh sebesar 20,38 terjadi pada tahun 2010 yang bermakna jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut sebesar 20,38% dari jumlah penduduk sebesar 4.523.144, yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 921.816, 75 dibulatkan 921.817. Tingkat kemiskinan minimum yang terjadi di provinsi Aceh selama periode pengamatan sebesar 15,01 dari jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 678.923,9 dibulatkan 678.924 dan nilai standard deviasi sebesar 1,744061 dapat dimaknai bahwa sebaran data kemiskinan selama periode pengamatan adalah sebesar 1,744061 satuan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi (PE) maksimum sebesar 4,95 yang terjadi pada tahun 2012 dan pertumbuhan ekonomi minimum sebesar -0,74 yang terjadi pada tahun 2020 serta nilai standard deviasi sebesar 1,918923 satuan menandakan sebaran data pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan. Kemudian, indeks demokrasi maksimum yang terjadi di provinsi Aceh selama periode

pengamatan adalah sebesar 79,97 dan ini termasuk kinerja demokrasi dalam katagori sedang yang terjadi pada tahun 2018, indeks demokrasi minimum sebesar 54,02 dan ini termasuk kinerja demokrasi buruk di provinsi Aceh yang terjadi pada tahun 2012.

Hasil estimasi pengaruh langsung variabel independen dan variabel mediasi serta variabel independen yang dimediasi oleh variabel mediasi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama periode pengamatan dari tahun 2010 hingga 2020 adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Method Least Squares

Variable	Coefficient	Prob.
Pertumbuhan Ekonomi	-0.216945	0.2500
Indeks Demokrasi	-0.176030	0.0023
R-squared	0.710225	
Nilai <i>sobel test Z</i>	0.346376	

*Dependent Variable: kemiskinan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel independen (pertumbuhan ekonomi) memiliki $\beta = -0,216945$ dan nilai Prob. sebesar 0,2500, maka dapat disimpulkan $\beta \neq 0$ dan nilai Prob. > nilai kritis. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama periode 2010 – 2020. Hasil ini menandakan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi 1 (satu) satuan, maka akan terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,216945 satuan. Hal ini terjadi karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka dengan sendirinya akan tercipta lapangan pekerjaan bagi pencari kerja yang berasal dari rumah tangga dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan pendapatan bagi rumah tangga-rumah tangga yang ada di provinsi Aceh. Dengan adanya peningkatan pendapatan akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri dan pada akhirnya akan dapat menurunkan kemiskinan yang ada.

Kemudian, variabel mediasi (indeks demokrasi) memiliki $\beta = -0,176030$ dan nilai Prob. sebesar 0,0023, maka dapat disimpulkan $\beta \neq 0$ dan nilai Prob. < nilai kritis. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa variabel mediasi (indeks demokrasi) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama periode 2010 – 2020. Bila terjadi peningkatan indeks demokrasi di provinsi Aceh sebesar 1 (satu) satuan akan dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0,176030 satuan. Hal ini terjadi karena dengan meningkatkan indeks demokrasi akan dapat memberikan kebebasan berusaha, mudah pelayanan investasi karena kelembagaan pemerintah semakin baik, dan terciptanya kondisi yang semakin aman. Oleh sebab itu, karena keadaan yang semakin baik, maka dengan sendirinya individu atau masyarakat bisa dengan leluasa dapat melaksanakan kegiatan ekonomi lebih baik dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, dengan meningkatkan kesejahteraan yang tercipta karena indeks demokrasi semakin baik, maka dengan sendirinya akan dapat menurunkan kemiskinan yang ada di provinsi Aceh.

Selanjutnya, nilai Z sebesar 0.346376 berarti nilai $Z < 1,98$, maka dapat disimpulkan bahwa indeks demokrasi tidak dapat memediasi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama periode pengamatan tahun 2010 – 2020. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi muncul karena semata-mata dipengaruhi oleh variabel ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jikapun demokrasi semakin baik tetapi variabel pertumbuhan ekonomi akan tetap mempengaruhi kemiskinan sendiri tanpa ada dorongan dari variabel yang lain termasuk demokrasi itu sendiri. Kemampuan variabel independen dan variabel mediasi mempengaruhi variabel dependen sebesar 0.710225 atau

71,02% dan sisanya dipenaguhi oleh variabel yang lain, seperti variabel iklim, variabel ketersediaan lahan dan lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh, variabel indeks demokrasi signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh, dan indeks demokrasi tidak dapat memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama periode pengamatan tahun 2010 -2020. Oleh sebab itu, untuk pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh para pemangku kepentingan harus bisa mendorong terlaksananya demokrasi semakin baik dan upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Habbe, A. H., Rura, Y., & Hakim, A. (2016). Relationship good governance with welfare society mediated by local government financial disclosure and audit report opinion (Study on Local Government South Southeast Sulawesi). *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 5(2), 789-800.
- Enzovani, S. (2020). The Effect of Democracy on GDP in OECD Countries. *Tests Engenering & Management* 82 (5082): 5082–86.
- Lestari, C. D., & Rahmawati, F. (2021). Measuring the Impact of Technology, Politics, and Human Resources on Inclusive Economic Growth in Indonesia. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 8(1), 65-85.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 17(1), 62-98.
- Nur, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 21 (3): 151–64.
- Paddu, A. H. (2015). Contribution Of Fiscal Decentralization To Poverty Reduction In Eastern Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* 17 (12): 53–60. <https://doi.org/10.9790/487X-171235360>.
- Pramono, G., & Marsisno, W. (2018). Availability of Infrastructure for Poverty in Indonesia : Spatial Panel Data Analysis. *Economics and Finance in Indonesia*. Vol. 64.
- Purnomo, S. D., & Istiqomah. (2019). Economic Growth and Poverty: The Mediating Effect of Employment. *Journal of Economics and Policy* 12 (1): 238–52.
- Rassanjani, S. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy. 8 (April): 44–55.
- Rıza, A. (2013). Democracy and Growth: Evidence from Transition Economies. 3 (1): 63–75.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Wandita, D. T., Gunarto, T., & Ratih, A. (2022). The Effect Of Economic Multidimensional

Poverty Growth. *JRSSEM* 01 (9): 1413–21.

www.bps.go.id. (2023). Data PDB. *Produk Domestik Regional Bruto*. www.bps.ac.id.

Zouhaier, H., & Karim, K. M. (2012). Democracy , Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Financial Issues* 2 (3): 233–40.